



PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, IV & JABATAN PELAKSANA TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA PELAKSANA

MASDIN, AP., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45 (sedang)
2	Meningkatnya layanan SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%
		Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%

Penjelasan :

1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

- Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Target	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap	Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator	Score IKD yaitu Nilai 0.01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,8 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

2. Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

- Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal.

Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Target	Sumber data
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	100% setiap tahun	BPBD dan OPD terkait

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.005.325.018,-	APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp 1.560.634.532,-	APBD
		Rp 4.565.959.550,-	

Malili, 02 Januari 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

Plt. KEPALA PELAKSANA,



(MASDIN, AP., M.Si)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SOFYAN BURHAN, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA PELAKSANA

MASDIN, AP., M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

SOFYAN BURHAN, ST

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
II.	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
1.	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%
a.	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen
b.	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 Orang
2.	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2%
a.	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen
b.	Terlatihnya aparaturnya dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	50 Orang
c.	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	21 Unit
d.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	2 Desa
e.	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 Orang
f.	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yg di susun sampai di nyatakan sah/legal	1 Dokumen
g.	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 Orang
3.	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%

a.	Tersedianya regulasi penanggulangan bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	3 Dokumen
b.	Tersedianya wadah yang melibatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	1 Lembaga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Rawan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 200.201.742,-	
a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp 174.995.642,-	APBD
b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 25.206.100,-	APBD
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 485.492.590,-	
a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 174.790.750,-	APBD
b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 32.425.900,-	APBD
c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 94.830.000,-	APBD
d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 34.912.800,-	APBD
e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Rp 29.890.000,-	APBD
f. Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp 99.506.640,-	APBD
g. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 19.136.500,-	APBD
3. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Rp 84.970.200,-	
a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 19.972.800,-	APBD
b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 64.997.400,-	APBD
	Rp 770.664.532,-	

Malili, 02 Januari 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,



(MASDIN, AP., M.Si)

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN,



(SOFYAN BURHAN, ST)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

MASDIN, AP., M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEDARURATAN
& LOGISTIK

MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Bidang : Kedaruratan dan Logistik
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
1.	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
a.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
b.	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%
c.	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%
d.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam menyiapkan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
e.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 755.000.000,-	APBD
a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Rp 625.000.000,-	APBD
b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,-	APBD
c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,-	APBD
d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 20.000.000,-	APBD
e. Respon Cepat Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit	Rp 30.000.000,-	APBD
	<hr/>	
	Rp 755.000.000,-	

Plt. KEPALA PELAKSANA,



(MASDIN, AP., M.Si)

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK,



(MARIA CLARET NITA TAMPA, ST)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BANNAWATI, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA PELAKSANA

MASDIN, AP., M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUKSI

BANNAWATI, ST

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Bidang : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terlaksananya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase penanganan sektor terdampak pasca bencana	100%
1.	Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%
a.	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	a. Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 34.970.000,-	APBD
a. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp 34.970.000,-	APBD

Plt. KEPALA PELAKSANA,



(MASDIN, AP., M.Si)

Malili, 02 Januari 2023
KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUKSI,



(BANNAWATI, ST)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA PELAKSANA

MASDIN, AP., M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat : Sekretaris
 Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 78.031.920,-	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.107.340.335,-	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 17.949.800,-	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 35.500.000,-	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 393.759.800,-	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 163.500.000,-	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 86.403.163,-	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 122.840.000,-	APBD
	Rp 3.005.325.018,-	

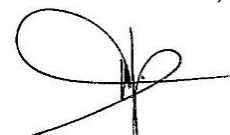
Plt. KEPALA PELAKSANA,



(MASDIN, AP., M.Si)

Malili, 02 Januari 2023

SEKRETARIS,



(MUH. JUMARDIN, SE)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHALIJAH, STP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

CHALIJAH, STP

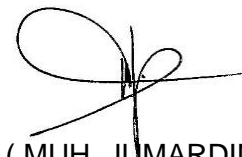
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Perencanaan
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 37.789.300,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.925.200,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.354.340,-	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.963.080,-	APBD
	Rp 78.031.920,-	

SEKRETARIS,



(MUH. JUMARDIN, SE)

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,



(CHALIJAH, STP)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	10 Orang
3.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis
4.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis
5.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis
6.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exempler
7.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	275 Orang
8.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	41 Kali
9.	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit

10.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	6 Unit
11.	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
12.	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit
13.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400 Surat
14.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening
15.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 Orang
16.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	13 Unit
17.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit
18.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

Sub

Kegiatan

Angaran

Keterangan

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	17.949.800,-	APBD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	35.500.000,-	APBD
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	12.625.000,-	APBD
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	25.000.000,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	25.000.000,-	APBD
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.720.000,-	APBD
7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	14.850.000,-	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Rp	309.564.800,-	APBD
9. Pengadaan Mebel	Rp	15.000.000,-	APBD

10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	30.000.000,-	APBD
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	85.000.000,-	APBD
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	33.500.000,-	APBD
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	4.182.475,-	APBD
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	62.420.688,-	APBD
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.800.000,-	APBD
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	93.300.000,-	APBD
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	19.540.000,-	APBD
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	10.000.000,-	APBD
	Rp	819.952.763,-	

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN,

(MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos)

SEKRETARIS,


(MUH. JUMARDIN, SE)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAENAL ABIDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

MUH. JUMARDIN, SE

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SAENAL ABIDIN, SE

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	16 Orang
2.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Angaran

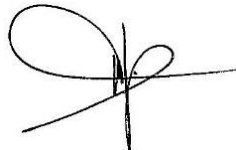
Rp 2.067.096.135,-
Rp 40.244.200,-

Rp **2.107.340.335,-**

Keterangan

APBD
APBD

SEKRETARIS,



(MUH. JUMARDIN, SE)

Malili, 02 Januari 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



(SAENAL ABIDIN, SE)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HASBAH, S.Sos

Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAENAL ABIDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SAENAL ABIDIN, SE

Pihak Pertama,

BENDAHARA PENGELUARAN

HASBAH, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA JABATAN PELAKSANA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Terlaksananya kegiatan Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	1 Kegiatan
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran ke BUD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah surat permintaan pembayaran yang diajukan	150 Dokumen
3	Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar yang dibuat	150 Dokumen
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Tagihan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibayar	1750 Kegiatan
5	Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah permintaan uang muka yang dibayar	41 Kegiatan

6	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dicatat dan diarsipkan	1750 Dokumen
7	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat	12 Dokumen
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan	Jumlah tugas kedinasan lain yang dilaksanakan	12 Kegiatan

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



(SAENAL ABIDIN, SE)

BENDAHARA PENGELUARAN,



(H A S B A H, S.Sos)